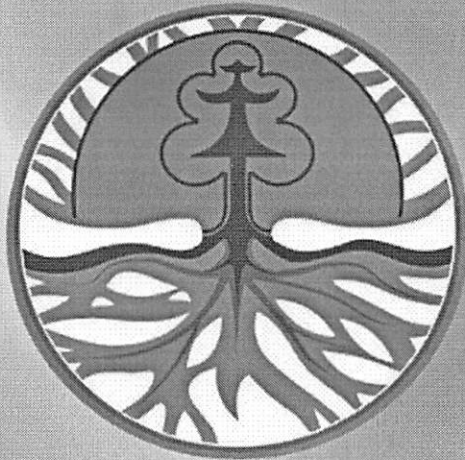


RENCANA KERJA TAHUN 2019



**DIREKTORAT
RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN
(029.06.0199.400198.KP)**

**Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lt. 5
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

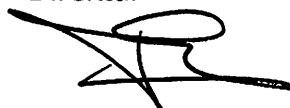
Renja ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016, analisis kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran, maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka perbaikan.

Harapan kami, Renja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2019 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akhirnya dapat menunjang Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Nopember 2018 ✓

Direktur



Ir. Kustanta Budi Prihatno, M Eng
NIP. 19600411 198703 1 001

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-2019 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;

5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan
6. wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah; dan
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam mendukung Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 mendapat tugas melaksanakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dengan sasaran Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan

Untuk melaksanakan kegiatan Perencaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2019, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100% dengan output (keluaran) sebagai berikut:

1. Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku, 100%
2. Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH, 409 KPH (Update)
3. Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 Provinsi
4. Jumlah KPH terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang wilayah, 34 Provinsi
5. Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTU, 600 KPH Update
6. Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, 3 dokumen.
7. Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project, 1 Laporan
8. Data Areal Perhutanan Sosial Jawa, 4 Provinsi
9. Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP), 15 Provinsi
10. Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH, 4 Provinsi
11. Layanan Perkantoran, 1 Layanan

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2019 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2019
2. Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang (planologi kehutanan/tata lingkungan) maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan bahwa Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan, Struktur Organisasi (*gambar terlampir*) terdiri dari atas :

1. Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan;
2. Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan;
3. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Subdirektorat Pembentukan Wilayah Dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan;
5. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi; dan
6. Subbagian Tata Usaha.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada tiap – tiap Subdirektorat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 Orang Kepala Seksi Penyusunan Rencana Makro Kehutanan, 1 Orang Kepala Seksi

- Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi dan 10 orang Staff PNS , 1 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN
2. Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan, terdiri dari 1 orang Kepala Subdirektorat, 1 orang Kepala Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah 1, 1 orang Kepala Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah 2, dan 10 Orang Staff
 3. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang kepala seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah 1, 1 orang kepala seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah 2, dan 13 orang staff PNS , 1 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN
 4. Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang kepala seksi pembentukan wilayah pengelolaan hutan, 1 orang kepala seksi alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan 9 orang staff PNS (2 orang Staff diperbantukan pada Lembaga FIP 2) , 3 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN, 1 Orang Tenaga Outsorcing
 5. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi , terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang Kepala Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi PKH, 1 orang kepala seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dan 19 orang staff PNS, 3 Orang Tenaga Outsorcing
 6. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 5 orang Staff PNS , 8 Orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN

II. Capaian Kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

Tahun 2018 merupakan tahun keempat periode pembangunan lima tahunan 2015-2019, sehingga diharapkan dapat meletakkan kondisi pemungkin bagi akselerasi pencapaian target pembangunan tiga tahun berikutnya. Kegiatan Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2018 diharapkan dapat menyiapkan instrumen dan regulasi untuk mendukung Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi dan Penggunaan Kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2017 dimonitor dan dievaluasi secara periodik selama tahun berjalan. Capaian IKK Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Kegiatan / IKK	Target Tahun 2017 (Akumulasi sd 2017	Capaian IKK	%
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100%
Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	100 KPH	100 KPH	100
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Data dan peta Arahan pemanfaatan hutan di 34 Prov.	Data dan peta Arahan pemanfaatan hutan di 34 Prov	100%
Seluruh KPH terintegrasi dalam tata ruang wilayah	100 KPH	100 KPH	100%
Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	100 KPH	100 KPH	100%
Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen (Datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)	3 dokumen (Datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)	100%

a. Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk mengakomodir permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Jumlah permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 358 pemohon dengan luas total areal 817.773,25 Ha dan terlayani 100%. Di antara permohonan yang masuk, yang memenuhi persyaratan untuk diproses sampai tahap penerbitan izin adalah sebanyak 253 pemohon.

b. Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan

Indikator kinerja KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang terdiri dari satu unit kegiatan yaitu: Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang telah tercapai sesuai target sebanyak 100 KPH. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100%. Progres pelaksanaan tahun 2018 Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan menargetkan pada 92 KPH.

Gambar : Perkembangan Pembangunan KPH Nasional



c. Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan yang masing-masing telah tercapai 19 sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi. Progres pelaksanaan tahun 2018 Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan menargetkan pada 34 provinsi.

d. Seluruh KPH terintegrasi dalam tata ruang wilayah

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH dengan pencapaian melebihi target yaitu sebesar 465 KPH, dimana sampai dengan tahun 2017 target sesuai Renstra adalah sebesar 458 KPH. Pelaksanaan integrasi pada saat itu hanya fokus pada 3 data penting yaitu Pola Ruang, struktur ruang dan kawasan hutan/KPH. Output dari kegiatan ini adalah rencana pembangunan non kehutanan dalam wilayah KPH dan perbedaan pola ruang antara Perda RTRWP dengan Keputusan Menteri Kehutanan terakhir tentang kawasan hutan. Progres pelaksanaan tahun 2018 Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan menargetkan pada 34 provinsi.

e. Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK

Indikator kinerja dari seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK dengan target akumulasi capaian adalah sebanyak 458 KPH pada tahun 2017. Bahan/data utama untuk pengintegrasian KPH ini adalah pola ruang dan struktur ruang dengan tema Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan; Peta Penggunaan Kawasan Hutan; Peta Kesesuaian Lahan dan Peta Penutupan Lahan. Pada tahun 2017, target pengintegrasian yang ditetapkan adalah 135 KPH (total dari 458 KPH) dapat tercapai sebanyak 529 KPH. Pengintegrasian dilakukan pada KPH di regional Papua, Sumatera Bagian Utara, dan Maluku.

f. Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan WilayahPengelolaan Hutan

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang telah selesai sebanyak 3 Judul sesuai dengan target. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dinamakan dengan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH), maka pada tanggal 27 April 2017 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.4/PKTL/REN/PLA.0/2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH). Perdirjen ini sebagai payung hukum dalam rangka implementasi pengelolaan data dan informasi dalam Sinpasdok KPH yang dikembangkan menjadi Sinpasdok KPH+ yang mana pengelolaan datanya berubah menjadi bersifat interaktif, mandiri, reliable, akurat dan terkini. Dengan adanya Perdirjen ini maka Sinpasdok KPH+ memiliki pengelolaan data KPH yang bersifat tersebar di tingkat tapak, terkendali di Pusat; terkoordinasi dan terintegrasi dengan sistem informasi lain lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Capaian Serapan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan hasil rekonsiliasi, realisasi penyerapan DIPA Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan TA 2017 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 12.450.752.995,- atau mencapai 80,91% dari total pagu sebesar Rp 15.388.583.000,-. Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2017 ini secara persentase mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak – Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.413.177.290.481 ,- atau sebesar 121,32% dari target sebesar 1.164.846.575.000

Realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp 12.450.752.995 ,- ini terdiri dari belanja barang yang didanai dari APBN sumber dana RM sebesar Rp. 6.360.778.978 dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp. 6.089.974.017,-.

Tabel : Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi 2017 dan Prognosis 2018	%
2017	Pendapatan Negara – PNBPKH	1.164.846.575.000	1.413.177.290.481	121,32
	Belanja Negara – Belanja Barang (RM)	15.388.583.000	12.450.752.995	80,91
2018	Pendapatan Negara – PNBPKH	1.181.072.841.000	1.535.241.339.864	129,98
	Belanja Negara- Belanja Barang (RM)	11.102.228.000	11.102.228.000	100%
	Belanja Negara- Belanja Modal (RM)	1.634.660.000	1.220.000.000	74,63%
	Belanja Negara- Hibah Luar Negeri	34.198.284.000	22.300.000.000	65,20%

III. RENCANA KERJA TAHUN 2019

Pada Tahun 2019, kegiatan Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan masuk dalam kegiatan prioritas nasional. Adapun kegiatan yang masuk dalam Proyek Prioritas Nasional 1 (Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar) Proyek Prioritas Nasional 3 (Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa) dan kegiatan Prioritas Bidang.

Sesuai tugas dan fungsi, untuk mencapai sasaran program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, pada Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan ditetapkan kegiatan yang diantaranya dilaksanakan untuk pencapaian prioritas nasional dan kegiatan prioritas bidang (reguler), dengan output dan target pada masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Kegiatan	Output	Target
PRIORITAS NASIONAL		
PN 1. PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR		
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan WPH	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	4 Provinsi
PN 3. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI DAN JASA PRODUKTIF		
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	409 KPH(Update)
	Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Provinsi
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RGTK	600 KPH (Update)
	Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)	15 Provinsi
PRIORITAS BIDANG		
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100 (%) Persen

Kegiatan	Output	Target
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan
	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Provinsi
	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH	4 Provinsi
	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen
Dukman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan
LAYANAN PERKANTORAN		
Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1 Layanan

Pada tahun 2019, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp. 41.713.336.000,-** dimana Pagu APBN sebesar Rp.8.830.186.000,- dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp. 32.883.150.000,-. Untuk membiayai kegiatan Prioritas Nasional 1 sebesar Rp. 1.100.000.000,- , Prioritas Nasional III sebesar Rp. 3.909.091.000,- , Prioritas Bidang sebesar Rp. 34.586.950.000 dan Kegiatan Dukungan Manajemen + Layanan Perkantoran sebesar Rp. 2.117.295.000,-.

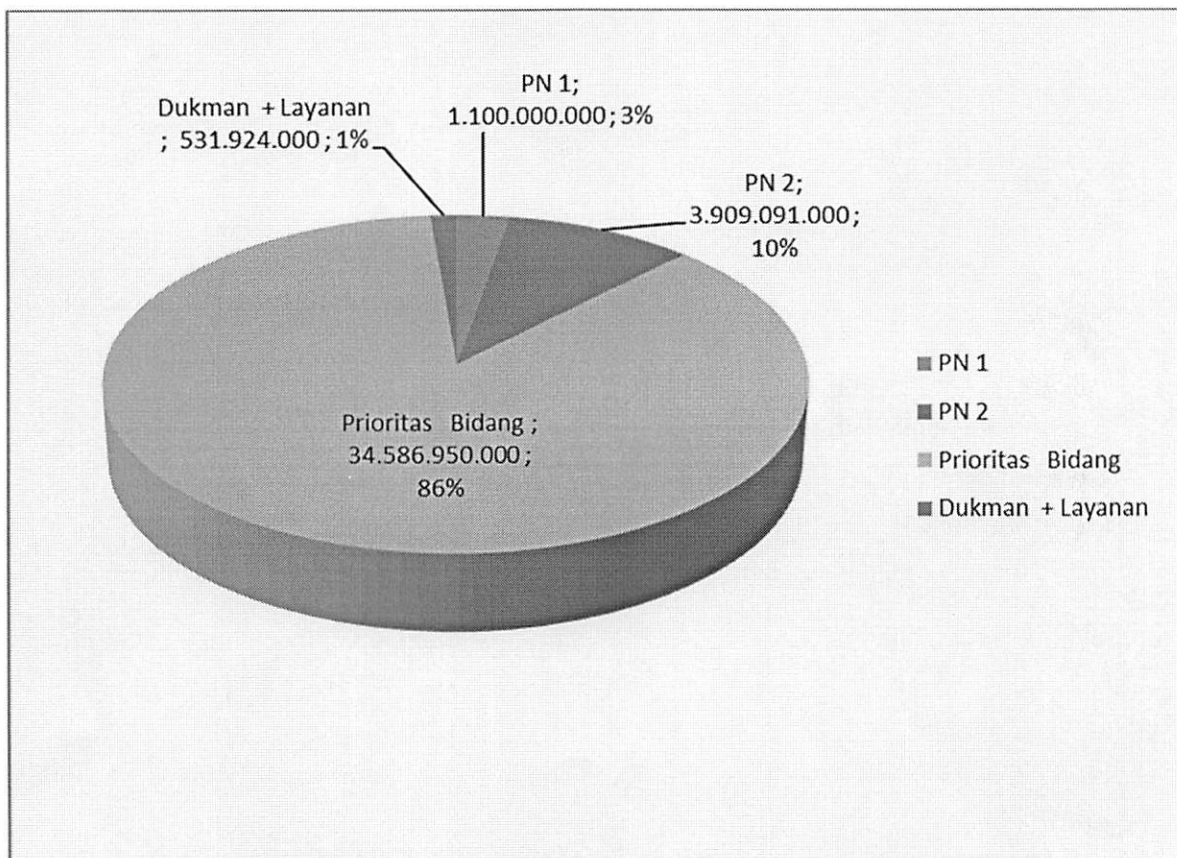
Komposisi Penyebaran Anggaran Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel : Sebaran Anggaran Direktorat RPPWPH berdasar Program Prioritas TA.2019

Kegiatan	Output	Pagu
PRIORITAS NASIONAL		
PN 1. PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR		
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan WPH	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Rp. 1.100.000.000
PN 3. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI DAN JASA PRODUKTIF		
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Rp. 1. 697.091.000
	Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	Rp. 175.260.000
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RGTK	Rp. 1. 202.240.000
	Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)	Rp. 834.500.000
PRIORITAS BIDANG		
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	Rp. 773.300.000
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	Rp. 32.883.150.000
	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	Rp. 292.000.000
	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH.	Rp. 202.900.000
	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 435.600.000

Kegiatan	Output	Pagu
Dukman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen	Rp. 531.924.000
LAYANAN PERKANTORAN		
Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp. 1.585.371.000

Chart : Komposisi Anggaran berdasarkan kegiatan Prioritas



Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2019 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

4. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 merupakan acuan utama bagi seluruh Sub Direktorat lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2019 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh investasi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di Tahun 2019, yang akan tertuang dalam DIPA TA. 2019, dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 dan DIPA TA. 2019 selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

[illegible]

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
011-Layanan Internal Organisasi	Kawasan Hutan, Penggunaan	78-poin	531.924								
Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan.	Kawasan Hutan dan	3-Dokumen	435.600								
Data areal perhutanan sosial Jawa	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa										
Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa		4-Provinsi	1.100.000	Pusat	Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Output											
Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa		4-Provinsi	1.100.000								
Jumlah KPH yang memiliki kemampuan RPHJP	Terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH										
Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)		15-Provinsi	834.500	Pusat	Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Tanpa Sub Output											
Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)		15-Provinsi	834.500								
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat	Dukungan Manajemen kegiatan rencana penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019										
Layanan Perkantoran		1-Layanan	1.585.371								
Tanpa Sub Output											
Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1-Layanan	1.585.371	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak